

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Partisipasi perempuan dalam ranah politik di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dengan masih kuatnya stereotipe patriarki dalam masyarakat Indonesia. Salah satu faktor yang seringkali dihubungkan dengan rendahnya keterlibatan perempuan dalam berpolitik adalah norma – norma agama, khususnya agama Islam. Meskipun dalam praktiknya agama Islam mengakui kesetaraan antara laki – laki dan perempuan dalam banyak bidang, interpretasi budaya dan sosial yang berkembang di Indonesia masih sering membatasi peran perempuan di ranah publik, salah satunya politik (Prastiwi & Hakim, 2024)

Persoalan diskriminasi gender di Indonesia perlu dibenahi khususnya di ranah politik dan perlunya peningkatan representasi politik perempuan di Indonesia. Ketimpangan antara laki – laki dan perempuan tidak seimbang, dapat dilihat dari peran pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang ada di parlemen Indonesia (Agustin Wulandari, 2023). Rendahnya representasi perempuan di parlemen Indonesia memiliki pengaruh pada terbatasnya kebijakan yang mendukung kesetaraan gender.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), mencatat bahwa saat pemilu legislatif representasi perempuan masih dibawah target dengan angka 20,87% kursi DPR atau 120 dari 575 kursi dari yang tersedia pada tahun 2019 yang padahal kuota yang dimiliki untuk perempuan bisa menduduki kursi DPR ada 30% (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019). Kondisi ini menggambarkan bahwa adanya hambatan struktural dan kultural yang memperburuk ketimpangan gender dalam pengambilan kebijakan di pemerintahan Indonesia.

Pembatasan perempuan di Indonesia menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya keterwakilan politik perempuan (Magriasti et al., 2022). Hal ini menjadi perhatian khusus bagaimana kebijakan – kebijakan tersebut kemudian nantinya diimplementasikan, karena implementasi yang adil dan inklusif juga menjadi faktor penting dalam mencapai kesetaraan gender. Setelah munculnya banyak tuntutan kepada perempuan untuk terlibat di dunia politik, Indonesia kemudian menjadikan keterwakilan perempuan dalam sejumlah undang – undang

Dinamika kelas juga menjadi salah satu faktor utama dalam keterwakilan perempuan. Faktanya, mayoritas perempuan yang berhasil menduduki kursi parlemen berasal dari keluarga elit politik, yang berarti menunjukkan bahwa dukungan finansial dan hubungan keluarga menjadi faktor penting dalam perempuan bisa berkarir politik di Indonesia. Program yang ada juga untuk perempuan seringkali hanya terfokuskan pada peran reproduktif, seperti dukungan hamil, namun kurang memberikan perhatian pada aspek partisipasi politik yang lebih luas (Putri Meldianto et al., 2024).

Fenomena ini menunjukkan bahwa realitas sosial dan budaya masih menjadi penghalang utama, meskipun adanya upaya dari negara ataupun masyarakat untuk meningkatkan perwakilan perempuan di ranah politik. Menurut Prihatini (2020) meski ada dukungan terhadap kuota, norma – norma patriarki yang terinternalisasi seringkali menjadi hambatan perempuan untuk maju sebagai kandidat politik. Pencalonan juga tidak selalu menjamin keberhasilan dalam pemilu, karena seringkali perempuan ditempatkan di posisi daftar partai yang lebih rendah, yang berarti peluang mereka untuk terpilih lebih kecil dibandingkan calon laki – laki. Meskipun jumlah calon perempuan meningkat tetapi jumlah perempuan yang terpilih menjadi anggota parlemen tidak meningkat secara proporsional.

Partai – partai politik berbasis Islam di Indonesia seringkali melibatkan beberapa dinamika unik terkait peran agama dalam berpolitik serta adanya tantangan yang dihadapi. Partai Islam di Indonesia seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai – partai ini telah memperjuangkan nilai mereka untuk tetap bisa relevan di tengah meningkatnya kompetisi dari partai nasionalis lainnya (Woodward, 2008). Secara historis, dibawah rezim Orde Baru, perempuan dimarginalkan dari kekuasaan politik dan hal ini menjadi warisan dan masih mempengaruhi struktur politik saat ini. Banyak partai politik yang masih memperlakukan perempuan sebagai figur simbolis daripada aktor politik yang substansial, meskipun gerakan perempuan telah kembali mendapatkan momentum secara bertahap. Contohnya, beberapa partai politik menyoroti dan mengangkat isu – isu perempuan, tetapi tidak benar – benar memperjuangkan kebijakan yang menangani ketidaksetaraan secara mendalam (Yusartika et al., 2023).

Menurut Tremmel & Wahl (2023), perempuan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan seringkali dianggap "ambisius" dan cenderung menghadapi stereotipe yang negatif, termasuk tuduhan "mengorbankan" kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Sifat ini memberikan *image* negatif pada perempuan yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan juga sering menghadapi dilema yang bertentangan dengan nilai dan norma tradisional, yang mengharapkan perempuan untuk bersikap lembut, sopan, cantik, dan santun. Akhirnya, perempuan yang sudah masuk dalam posisi pengambil keputusan seringkali dihadapkan pada dilema antara memenuhi harapan tentang bagaimana perempuan seharusnya bersikap dan mengambil peran yang lebih berani dan membuat keputusan yang lebih strategis.

Masyarakat sering memegang harapan yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan dalam berbagai konteks, mulai dari peran mereka dalam rumah tangga hingga partisipasi dalam pengambilan keputusan politik (Wahyudi, 2018). Mengatasi kesenjangan gender dan mengubah paradigma politik dan ekonomi. Realitas sosial membutuhkan perubahan budaya, kesadaran akan bias gender, dan upaya kuat untuk mendukung hak-hak perempuan dan perjuangan mereka untuk kesetaraan gender. Gerakan feminis telah memainkan peran penting dalam mencerminkan identitas perempuan dan dalam upaya untuk mengatasi hambatan sosial dan politik.

Menurut Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedudukan warga negara laki-laki dan perempuan sama. Demikian pula, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menetapkan hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan.

Perempuan di berbagai belahan dunia saat ini masih mengalami banyak kesulitan seperti perempuan dianggap lebih rendah daripada laki - laki, perempuan juga menghadapi hambatan yang lebih signifikan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan untuk bekerja dibandingkan kaum laki – laki (Shang, 2022). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mengakui hak perempuan. khususnya dalam berpolitik memerlukan kebijakan khusus yang kesadaran ini berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini.

PBB sangat peduli dengan masalah perempuan karena fakta sosial ini. Majelis Umum PBB mengadopsi Konvensi Hak Politik Perempuan atau *Convention on the Political Right of Women* (CPRW) pada 7 Juli 1954, dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada 18 Desember 1979 (Bacchi & Eveline, 2010). Selama sepuluh tahun, belum ada kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan kedua dokumen tersebut. Akibatnya, Platform Aksi Beijing atau *Beijing Platform for Action* (BPFA) dideklarasikan pada Konferensi Dunia tentang Perempuan Keempat 1995 di Beijing, Tiongkok. Deklarasi ini menegaskan bahwa pendidikan tentang hak-hak perempuan dan pembentukan organisasi yang melindungi perempuan dari pelanggaran hak-hak diperlukan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan.

Lebih jauh, memasuki abad ke-21, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dihadiri oleh 189 negara dari seluruh dunia, menetapkan Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). Tujuan ketiga dari MDGs adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Setelah keberhasilan tujuan MDGs yang berakhir pada tahun 2015, Majelis Umum PBB melanjutkan komitmen global untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan dengan mengadopsi *Sustainable Development Goals* atau sekarang kita kenal sebagai SDGs yang berisikan 17 tujuan, yang salah satunya pada tujuan ke 5 adalah Kesetaraan Gender, yang memperluas visi dari MDGs dengan fokus yang lebih mendalam tidak hanya pemberdayaan perempuan, tetapi juga menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan di semua bidang termasuk akses terhadap partisipasi politik tentunya.

Pemerintah Indonesia mendirikan Kementerian Hak-Hak Politik Perempuan sebelum meratifikasi Konvensi Anti-Korupsi (CEDAW). Mereka telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan. (Patrajaya & IAIN Palangka Raya, 2022).

Desy Ratnasari seorang anggota DPR RI dari Partai Politik Nasionalis Partai Amanat Nasional (PAN) juga melihat fenomena perempuan di politik ini di penelitian miliknya yang membahas mengenai kurangnya motivasi perempuan untuk mengikuti kompetisi politik dikarenakan faktor - faktor sosial eksternal, ia mengatakan “Perempuan di politik menghadapi tantangan yang signifikan dari konteks sosial eksternal” dalam sidang ujian terbuka Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) Atma Jaya (Atma Jaya, 2024). Menariknya, hasil penelitian Desy Ratnasari menunjukkan bahwa belum tercapainya kuota yang ada di parlemen saat ini untuk perempuan di politik tidak terkait dengan faktor internal seperti *self-efficacy* atau intensi. Melainkan, hal ini dikarenakan oleh persepsi kesetaraan gender yang menjadi faktor eksternal penghambat motivasi perempuan dalam meraih kekuasaan.

Dalam sebuah proses komunikasi untuk berinteraksi dapat meningkatkan kesadaran, mempengaruhi sikap, memperkaya pengetahuan, dan mendorong pembentukan perilaku positif dalam diri individu (Servaes & Lie, 2020). Hal ini dapat terbentuk dengan menggunakan unsur komunikasi seperti dialog, debat, negosiasi, proses interaksi, berbagi pengetahuan, dan aksi kolektif (McKee et al., 2014). Perilaku dapat terbentuk jika ada integrasi antara komunikasi dari pelaku utama (organisasi bisnis, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya) kepada target melalui perencanaan dan pelaksanaan yang matang sehingga dapat terjadi peningkatan (Flint, 2013). Untuk memahami perilaku individu, perlu pengertian akan dasar pembentukan perilaku. *Social Behaviour and Change Communication (SBCC)* adalah konsep konsep yang digunakan dalam penelitian pembentukan perilaku positif, yang didasarkan pada pengertian norma dan struktur komunitas sosial secara keseluruhan (McKee et al., 2014). Masih dalam McKee menjelaskan bahwa dalam konsep SBCC terdapat 3 strategi utama yaitu *Advocacy*, *Social and Community Mobilization*, dan *Behaviour and Change Communication*.

Peneliti tertarik setelah melihat fenomena diatas yang pada realitanya ternyata beberapa partai politik di Indonesia memiliki program untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah politik. Seperti pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri yang juga memiliki komitmen yang kuat terhadap kesetaraan gender. Partai ini secara aktif mempromosikan calon perempuan dalam setiap Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif. Tidak hanya itu, partai ini juga aktif dalam mendorong kaderisasi perempuan melalui pelatihan dan pendidikan politik. Strategi komunikasi melalui pembentukan komunitas juga dilakukan oleh partai politik PDIP, yaitu Komunitas Perempuan Marhaenis. Komunitas ini berfungsi untuk membina dan memberdayakan perempuan dalam konteks ideologi Marhaenism yaitu ideologi dari Presiden Pertama Indonesia yaitu Dr. (HC) Ir. Soekarno. Komunitas ini memiliki program seperti pelatihan politik dan advokasi untuk perempuan, serta mengoordinasikan berbagai kegiatan sosial dan politik (Ford, 2017).

Partai Golongan Karya (Golkar) juga memiliki sejarah panjang dalam memberikan dukungan terhadap peningkatan partisipasi perempuan dalam politik. Golkar sering mengadakan program pelatihan bagi kader perempuan, dan mengintegrasikan isu – isu perempuan dalam kebijakan partai. Golkar juga yang telah mendorong penerapan kuota 30% untuk calon perempuan untuk bisa mengikuti pemilu dan menduduki kursi legislatif di Indonesia. Tidak hanya di kursi legislatif tetapi juga Golkar juga mendorong dan memastikan kader perempuan memiliki akses ke posisi penting di internal partai (Swastiko, 2019). Partai Golkar juga memiliki strategi komunikasi melalui komunitas yaitu Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Komunitas ini memiliki fungsi yang mirip dengan partai lainnya yaitu meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik.

Selain kedua partai diatas ada juga Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki Komunitas Perempuan Amanat Nasional (PUAN) yang berupaya sebagai komunitas pendukung perempuan dan mengadvokasi kebijakan – kebijakan yang lebih inklusif gender, baik tingkat daerah maupun secara nasional (Parameswari, 2024). Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki komunitas Muslimat NU dan Fatayat NU (Anas Mahfudhi & Perdana, 2022).

Partai selanjutnya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki sayap perempuan PKS – Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) dan Rumah Keluarga Indonesia (RKI). Bedanya dari kedua program ini adalah BPKK lebih bersifat formal dan politik dengan fokus pada kaderisasi perempuan dalam PKS dan RKI merupakan program komunitas PKS yang berfokus pada kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat (Lestari, 2017).

Masih menurut Lestari, 2 program ini memiliki fokus kaderisasi dan advokasi yang berbeda untuk perempuan. BPKK berfokus pada pengembangan kapasitas anggota perempuan PKS melalui pelatihan dan pendidikan politik. BPKK juga memprioritaskan meningkatkan peran perempuan dalam struktur internal partai. Sedangkan, RKI memiliki fokus yang lebih luas dalam masyarakat yaitu program dari RKI pelatihan dan pendidikan yang tidak hanya untuk kader partai tetapi juga untuk masyarakat umum dengan tujuan memperkuat peran perempuan di keluarga dan pembangunan nasional. Fungsi advokasi di RKI lebih luas dari BPKK yaitu sebagai jembatan antara partai dan masyarakat dalam konteks politik.

Dari Partai Keadilan Sejahtera (2020), Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) merupakan bidang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berfokus pada peningkatan dan penguatan peran perempuan dan ketahanan keluarga. BPKK memiliki tujuan yang tercermin pada visi 2020 – 2025 yaitu menjadi Partai Islam rahmatan lil'alamina yang kokoh dan terdepan dalam melayani rakyat dan negara. Strategi implementasi BPKK mempunyai 4 pilar yaitu ketahanan keluarga, optimalisasi hubungan kelembagaan perempuan, penguatan paradigma ketahanan keluarga, peningkatan kapasitas dan penokohan anggota perempuan di PKS. Bidang ini berfokus pada perempuan internal partai sehingga program di BPKK lebih berfokus bagaimana kader perempuan di PKS bisa menjadi tokoh legislatif.

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A

Masih dari Partai Keadilan Sejahtera, Rumah Keluarga Indonesia (RKI) adalah program BPKK PKS yang memiliki tujuan utama membangun keluarga yang berkualitas di Indonesia. RKI memiliki peran dalam advokasi sosial, pengembangan ekonomi keluarga, garda terdepan dalam menciptakan ketahanan keluarga yang dituangkan dalam kebijakan nasional Indonesia, dan pendidikan keluarga. Kedua program ini memiliki kesamaan dalam hal kesetaraan gender khususnya dalam upaya untuk meningkatkan peran perempuan dalam legislatif tetapi terdapat perbedaan yaitu BPKK berfokus pada program internal sedangkan RKI berfokus pada program masyarakat atau external.

Peneliti melihat keunikan dari program yang ada di Partai Keadilan Sejahtera ini, yaitu PKS merupakan partai agamis yang berbasis pada nilai – nilai islam, seringkali dianggap sebagai partai yang mendukung norma tradisional yang kuat akan patriarki. Peneliti melihat bahwa meskipun PKS memiliki persepsi patriarki di masyarakat, mereka memiliki program untuk memberdayakan perempuan tidak hanya dalam konteks berkeluarga dan sosial tetapi juga konteks advokasi atau politik.

Peneliti juga tertarik pada bagaimana terdapat ketegangan antara nilai – nilai modern mengenai kesetaraan gender dengan norma – norma tradisional yang masih kuat yang sangat bersebrangan dan menjadi tantangan bagi partai – partai di Indonesia khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kritik dari masyarakat juga seringkali muncul mengenai efektivitasnya dalam melawan norma patriarki yang ada. Merujuk pada fakta diatas peneliti ingin meneliti mengenai strategi komunikasi yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah politik melalui program BPKK dan RKI.

Dalam penelitian ini berfokus pada 3 strategi utama SBCC yaitu *advocacy*, *social and community mobilization*, dan *behaviour and change communication* agar dapat melihat bagaimana SBCC meningkatkan partisipasi politik perempuan di PKS. Dalam tahapan ini, strategi SBCC menjadi elemen penting untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai politik mampu beradaptasi dalam mengatasi keadaan dan kondisi yang ada di masyarakat. Kemampuan PKS dalam membaca kondisi juga tergambar dari respond partai dalam menangani isu keterwakilan perempuan dalam politik dengan membentuk Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) yang memiliki program yaitu Rumah Keluarga Indonesia (RKI) (Musafa & Vanel, 2024).

RKI memiliki program untuk memperdayakan perempuan anggota partai melalui pelatihan – pelatihan politik seperti kepemimpinan dan politik lebih mendalam, advokasi sosial dan juga pendidikan keluarga. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perempuan dan keluarga untuk berpartisipasi dalam proses politik di Indonesia dengan mengikuti kegiatan – kegiatan yang dirancang oleh RKI yaitu membantu masyarakat memahami pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik serta isu – isu yang mempengaruhi keluarga melalui seminar, lokakarya dan kampanye kesadaran secara daring dan luring.

U N I V E R S I T A S  
M U L T I M E D I A  
N U S A N T A R A

Dari penelitian yang dilakukan oleh Lestari menunjukkan bahwa upaya PKS melalui BPKK dan Programnya yaitu RKI memiliki dampak positif terhadap keterwakilan perempuan dalam berpolitik. Menurutnya ada peningkatan signifikan setelah adanya program - program pelatihan dan pendidikan yang diadakan oleh BPKK dan Programnya RKI. Ini menunjukkan bahwa PKS tidak hanya mampu beradaptasi dengan isu yang ada di masyarakat tetapi juga menyumbang kontribusi pada perubahan sosial yang lebih besar. Melalui pembentukan BPKK dan Program RKI, PKS memperkuat posisi perempuan di legislatif dan juga di partai internal itu sendiri. PKS juga memberikan peningkatan kesadaran di masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses politik di Indonesia. Langkah strategis ini sejalan dengan visi PKS yaitu menjadi partai yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Respond dari PKS berbeda dari partai lainnya, menurut penelitian dari Swastiko, yang meneliti mengenai respond dari Partai Golkar, partai lainnya seperti PDIP ternyata memiliki respond yang berbeda, contohnya dari penelitian beliau adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tidak memiliki sayap yang terhubung dengan partai. Satu-satunya bidang PDIP adalah Bidang Perempuan dan Anak, yang didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan kebijakan strategis partai yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta masalah kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan (Pasal 18 ART PDIP).

Meskipun PDIP diketuai oleh perempuan yaitu Megawati Soekarnoputri, namun tidak berarti partai memiliki perspektif gender. Terbukti dari pernyataan dari Megawati yang seringkali menolak sistem kuota karena merasa hal tersebut adalah bentuk diskriminasi. Departemen pemberdayaan perempuan dan anak PDIP juga tidak mempunyai program yang jelas yang berhubungan dengan proses rekrutmen khusus untuk perempuan. Program departemen ini antara lain pendirian lembaga pembiayaan ekonomi, pendidikan dan pelatihan kaum perempuan baik formal dan non formal.

Didukung dengan penelitian dari Majid & Fitriyah (2019), program yang ada di PDIP dalam penelitian menunjukkan bahwa program yang ada di partai tidak cukup spesifik atau terfokus pada proses rekrutmen dan pengembangan untuk perempuan dalam politik. Masih menurut Majid & Fitriyah, penelitian yang dilakukan di DPD PDIP Jawa Tengah memiliki pola rekrutmen partai bersifat terbuka namun tidak memiliki mekanisme yang jelas untuk mendukung perempuan secara khusus. Proses di partai lebih bersifat netral yang dimana laki – laki dan perempuan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya program afirmatif yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam posisi kepemimpinan. Sama seperti penelitian sebelumnya dari Swastiko, meskipun PDIP mengakui pentingnya keterwakilan perempuan tetapi implementasi pada kebijakan masih kurang efektif dalam memberikan dukungan yang jelas bagi perempuan untuk terlibat di ranah politik secara aktif.

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh Haq (2024a) dalam laporan yang disampaikan oleh Ketua Bidang Badan Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK), Kurniasih Mufidayati, data mengatakan bahwa adanya peningkatan jumlah kader perempuan baru pada periode 2021 – 2023. Program BPKK adalah melaksanakan kampanye edukasi yang efektif melalui seminar, workshop, dan media sosial untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya peran mereka dalam partisipasi politik. BPKK memanfaatkan saluran komunikasi tradisional dan digital sehingga mereka berhasil menjangkau lebih banyak audiens mereka khususnya perempuan dan memberikan informasi mereka tentang adanya peluang dan kesempatan mereka untuk berpartisipasi politik.

Ketua BPKK PKS juga menyampaikan bahwa lebih dari 10 ribu titik Rumah Keluarga Indonesia (RKI) telah terbentuk di seluruh Indonesia dengan lebih dari 2500 konsultan RKI yang aktif dalam program RKI dengan ran peserta di lebih dari 34 Provinsi di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa program ini telah memiliki jangkauan yang luas dan berpotensi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan di berbagai daerah di Indonesia (Mufidayati, 2023). Ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh BPKK berhasil untuk melakukan pendekatan ke masyarakat, sehingga muncul rasa percaya di masyarakat terhadap PKS sebagai partai yang mendukung keterwakilan perempuan di politik.

Data dari siaran pers yang dilakukan Perludem (2024), mengatakan bahwa hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tahun 2024 menunjukkan keterwakilan perempuan meningkat menjadi 22,1% atau 128 kursi dari 580 kursi DPR, dibandingkan dengan data Pemilu pada tahun 2019 dengan hanya 20,5% yaitu 118 kursi dari 575 kursi yang tersedia. Data ini menunjukkan bahwa seluruh partai berhasil melakukan peningkatan khususnya PKS melalui program BPKKnya.

Dalam buku *Membangun Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat* karya Suparto (2021), Partipasi politik adalah keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas dan kegiatan politik, seperti pemilihan dan aktivitas politik lainnya. Secara khusus, partisipasi politik masyarakat mencakup proses perumusan kebijakan yang signifikan. Namun, Suparto mengatakan bahwa mayoritas masyarakat masih tidak memahami hal itu. Biasanya masyarakat hanya tahu bahwa politik sebatas menentukan pilihan saja. Masyarakat merasa politik tidak penting, golput ataupun tidak nasibnya tidak akan berubah. Sedangkan, konsep berpartisipasi pada politik mempunyai implikasi mendalam.

Menurut Syahril dalam buku ini partisipasi politik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok orang yang aktif terlibat dalam aktivitas politik, seperti memilih presiden dan memengaruhi kebijakan pemerintah. Menurut Meriam Budiardjo dalam buku ini karena partisipasi politik umumnya merupakan aktivitas individu atau kelompok yang aktif terlibat dalam kehidupan politik, seperti memilih presiden yang memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung pada perumusan kebijakan. Selain itu, partisipasi dapat dilakukan dengan mengikuti pemilihan umum, menghadiri rapat, menjalin hubungan dengan pejabat pemerintahan atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat, menjadi kader partai atau menjadi simpatisan partai yang aktif di setiap kegiatan partai.

Dalam buku ini menjelaskan bahwa tingkatan partisipasi politik menurut David F. Roth dan Frank I. Wilson Dari paling bawah ke atas, ada orang yang bekerja sebagai dokter, pengamat (menghadiri rapat umum, menjadi anggota partai atau kelompok kepentingan, berusaha meyakinkan orang, memberikan suara dalam pemilu, berbicara tentang masalah politik, memperhatikan perkembangan politik), lalu naik ke partisipan (petugas kampanye, anggota aktif partai atau kelompok kepentingan, berpartisipasi dalam proyek sosial), dan aktivis (pejabat partai aktivis sepenuh waktu, pemimpin partai atau kelompok kepentingan..

*Social Behaviour and Change Theory (SBCC)* adalah sebuah proses komunikasi secara interaktif dengan individu, komunitas, institusi, ataupun masyarakat sebagai bagian dari keseluruhan program penyebaran informasi, motivasi, pemecahan masalah dan juga perencanaan (Goozee et al., 2022). SBCC merupakan strategi komunikasi yang didasarkan pada ilmu perilaku untuk mempengaruhi pengetahuan, sikap dan norma sosial. SBCC menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk mendorong dan mempertahankan perilaku positif di antara individu, komunitas, dan Masyarakat.

SBCC menggunakan proses sistematis yang mencakup penelitian formatif dan analisis perilaku, perencanaan komunikasi, pelaksanaan dan pemantauan, menciptakan lingkungan yang mendukung hasil yang diinginkan, dan evaluasi. SBCC memiliki 3 elemen inti yaitu komunikasi, perubahan perilaku, dan perubahan sosial. SBCC menggunakan 3 strategi utama yaitu *Behaviour Change Communication (BCC)* adalah strategi untuk mengubah pengetahuan, sikap, keyakinan, dan praktik konsumen (target audiens), dan mengubah norma sosial. *Social and Community Mobilization* adalah strategi untuk mengubah kebiasaan dan norma sosial, dan menghasilkan partisipasi yang lebih luas, pembangunan koalisi, dan kepemilikan local di antara kelompok, asosiasi, dan jaringan yang berpengaruh di Masyarakat. *Advocacy* adalah strategi untuk menghasilkan dukungan aktif, sumber daya, dan komitmen politik – sosial yang menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk perubahan perilaku yang diinginkan secara berkelanjutan.

Usaha yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bisa dilihat dari perspektif *Social Behaviour and Change Theory (SBCC)* dimana program mereka yaitu Badan Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) sangat berkaitan erat dengan SBCC yaitu bagaimana program dari BPKK bisa mengubah persepektif perempuan di ranah politik sehingga berpartisipasi dalam politik, memobilisasi komunitas dan sosial, bahkan sampai di proses advokasi.

Dari penjelasan diatas peneliti ingin melihat lebih dalam bagaimana strategi komunikasi yang digunakan oleh PKS melalui BPKK sehingga bisa meningkatkan partisipasi politik perempuan di PKS.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan tersebut maka peneliti akan mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana strategi komunikasi BPKK PKS dalam peningkatan partisipasi politik perempuan di PKS?”

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi BPKK dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di masyarakat dan PKS. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan yang ada di BPKK dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam program komunikasi.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam mengetahui strategi komunikasi yang meningkatkan keterwakilan perempuan melalui program komunikasi partai. Maka dari itu, penting untuk mengevaluasi terhadap strategi komunikasi partai dalam peningkatan keterwakilan perempuan baik di kepengurusan partai maupun parlemen di Indonesia.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan juga memberikan manfaat secara praktis bagaimana strategi komunikasi yang efektif dan efisien dalam meningkatkan keterwakilan perempuan melalui program komunikasi yang dilakukan oleh partai.

### **1.5.3 Kegunaan Sosial**

Penelitian ini diharapkan menghadirkan manfaat untuk masyarakat luas untuk sadar bahwa pentingnya strategi komunikasi yang efektif untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di partai maupun masyarakat. Penelitian ini juga diharapkan menghadirkan manfaat kesadaran di masyarakat tentang bagaimana pentingnya strategi komunikasi yang tepat untuk mencapai kesuksesan.

### **1.5.4 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena penelitian ini hanya berfokus pada satu partai yaitu PKS, sehingga tidak mempertimbangkan perbandingan dengan partai politik lain yang

mungkin memiliki program lebih jelas dan efektif dalam mendukung keterwakilan perempuan. Metodologi kualitatif juga memiliki keterbatasan yaitu tidak mencakup semua dimensi dari permasalahan yang ada.



UMN

UNIVERSITAS  
MULTIMEDIA  
NUSANTARA